



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	4
1.4 Sistematika Penulisan	7
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	7
1.6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	10
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Efisiensi Anggaran	51
3.3 Inovasi	53
3.4 Penghargaan	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	59
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	7
Tabel 1.2 : Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023	8
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	10
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	12
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	13
Tabel 2.4 : Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	14
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	20
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 3.2 : Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 3.3 : Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	24
Tabel 3.4 : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020 - 2024	26
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2024	28
Tabel 3.6 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	29
Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	31
Tabel 3.8 : Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	33
Tabel 3.9 : Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	41
Tabel 3.10 : Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2024	51
Tabel 3.11 : Sebaran Kios Pangan Murah di Kab/Kota se Jawa Tengah	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : ASN Berdasarkan Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	5
Gambar 2.1 : Instrumen Pendukung Capaian Kinerja DISHANPAN Tahun 2024	20
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Dinas Paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan Th. 2024	53
Gambar 3.2 : Penerimaan Penghargaan SPHP AWARD 2024	53
Gambar 3.3 : Penerimaan Penghargaan Daerah Penyaluran Bantuan Pangan	53
Gambar 3.4 : Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	54
Gambar 3.5 : Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2024	54
Gambar 3.6 : Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik 3 dalam Capaian Skor PPH Provinsi Tahun 2023	54
Gambar 3.7 : Penerimaan Penghargaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Belanja Persentase Tinggi di tingkat Provinsi Jawa Tengah	55
Gambar 3.8 : Penerimaan Penghargaan Kepala Daerah yang memiliki Komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	55

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Ungaran, Januari 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna optimalisasi kebijakan Pangan serta optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang kebijakan Pangan di Provinsi Jawa Tengah, maka diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari satuan kerja, unit organisasi, hingga kementerian/lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hal terpenting dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada DISHANPAN. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Isu-isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis juga memperhatikan kondisi di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat berdasarkan pada prinsip Aktual, Problematik, Khalayak dan Layak (APKL) serta berdasarkan prioritas mendesak, serius dan bila tidak ditangani akan menjadi masalah (*Urgent, Serious and Growth*).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian. Walaupun produksi pangan Jawa Tengah secara umum mengalami pertumbuhan positif namun belum semua pangan tersedia secara cukup dan merata dari hasil produksi Jawa Tengah. Kekurangan ketersediaan masih terjadi pada antara lain pada komoditas kedelai sehingga sampai saat ini kebutuhan masih harus ditutup dari impor.

Meskipun ketersediaan pangan pokok beras di Jawa Tengah surplus, lebih dari jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun, hal itu disebabkan karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok beras.

Ketersediaan pangan semakin menarik perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrem memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang

berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Distribusi Pangan

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting karena sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

6. Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan

perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan.

7. *Food Loss and Waste*

Food loss atau susut pangan adalah bahan pangan yang terbuang dalam rantai pasok dari petani ke pasar. Ini bisa terjadi akibat distribusi dan pengemasan yang tidak baik hingga membuat bahan pangan rusak dan tidak bisa dijual. Sementara, *food waste* atau limbah pangan terjadi di tingkat pasar ritel hingga di tingkat konsumen. Pangan terbuang akibat tidak laku ataupun penyiayaan di rumah tangga. *Food loss* dan *food waste* Indonesia itu terbesar ke-3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Laporan Bappenas 2021, *food loss* dan *food waste* Indonesia selama 2000 – 2019 mencapai 150 – 184 kg per kapita pertahun yang harusnya bisa memberi makan 30% – 40% populasi.

8. Keamanan Pangan Segar

Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.

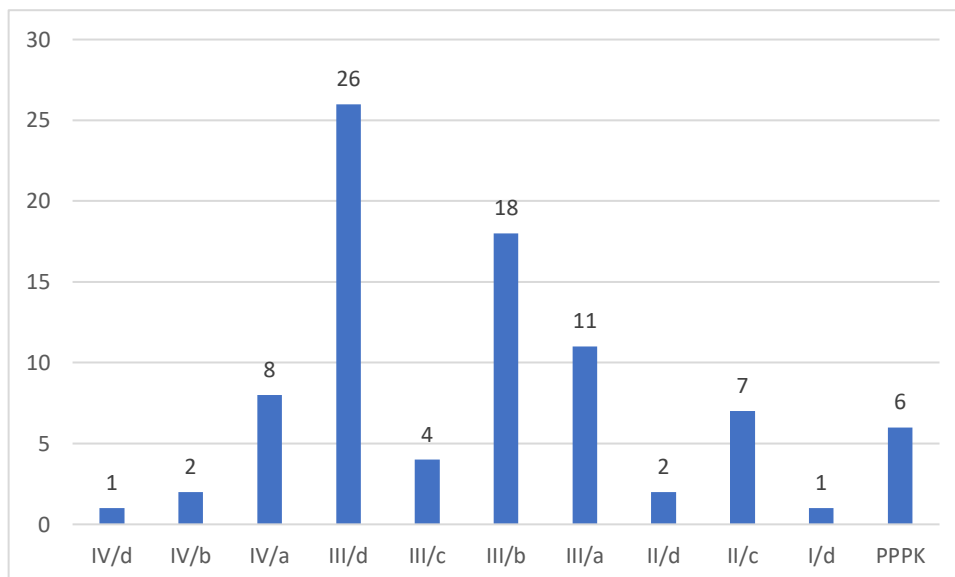
9. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Diterbitkannya Permentan Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), yaitu bahwa produk PSAT yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan harus memiliki nomor register. Hal tersebut menjadi tantangan Dinas Ketahanan Pangan melalui OKKP-D dalam hal sertifikasi jaminan mutu pangan, baik dalam hal sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 86 orang. Terdiri dari 7 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III, 3 orang eselon IV dan 51 jabatan fungsional umum serta 28 orang jabatan fungsional khusus yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.1).

Gambar 1.1
ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Bangunan gedung kantor 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, gedung pertemuan/aula besar kapasitas kurang lebih 150 orang, Ruang rapat kecil 2 buah dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 30 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, gedung kantor gudang cadangan pangan 1 (satu), 1 (satu) gedung eks. Toko Tani Indonesia Center (TTIC), gudang cadangan pangan pemerintah 2 unit dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula, 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas;
2. Personal komputer sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit, 54 (lima puluh empat) unit laptop, 22 (dua puluh dua) UPS, dan 52 (lima puluh dua) printer;
3. 12 (dua belas) jaringan mesin telepon/fax dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375;
4. Televisi sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
5. Sebanyak 57 (lima puluh tujuh) AC split, 5 (lima) AC floor, 2 (dua) AC cassette dan 15 (lima belas) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan, dimana 8 (delapan) unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan;
6. LCD sebanyak 16 (enam belas) unit, 6 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan, Camcorder DVD 1 (satu) unit;

7. Kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebanyak 16 (enam belas) unit
8. Kendaraan roda 2 (Sepeda motor) sebanyak 16 (enam belas) unit, di mana 8 unit dalam kondisi rusak berat dan akan diusulkan penghapusan aset;
9. Rice Mill Unit (RMU) 3 (tiga) unit, dryer/pengering 1 (satu) unit, Cold Storage 1 (satu) unit
10. 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 326 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran);
11. Alat Pemotong Kertas 2 (dua) unit; Video Conference 1 (satu) unit, kursi rapat besi 70 (tujuh puluh), kursi eselon 5 (lima), televisi 4 (empat), dispenser 3 (tiga), bracket TV 3 (tiga), meja rapat 31 (tiga puluh satu), meja rapat pimpinan 2 (dua), genset kapasitas 140 KVA 1 (satu), UPS computer 3 (tiga), pallet plastik 30 (tiga puluh), router 1 (satu) set, Lemari es 1 (satu), Camera digital 1 (satu), CCTV 2 paket, Drone 1 (satu), Kursi putar staf 23 (dua puluh tiga), kursi hadap 2 (dua), Sound system gedung pertemuan baru 1 (satu) paket, Microphone kabel 2 (dua), microphone wireless 2 (dua), Sound system podcast 1 (satu) paket
12. Pada BPMKP terdapat Filling Cabinet 1 (satu), Vacum Cleaner 1 (satu), AC split 4 (empat), UPS 10.000 VA Laboratorium BPMKP 1 (satu), Compressor Swan 1 (satu), Hand Blander Philips 1 (satu), Graphite Furnace 1 (satu), Lemari Pendingin/Kulkas 2 Pintu Samsung 1 (satu), Testing Milling Crown CTM-18 1 (satu), Micropipet 100-1000ul 1 (satu), Peralatan Laboratorium Set Toolkit 1 (satu), Rak Pengering Glassware 1 (satu).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam 14 (Empat belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 40.421.263.000,- (empat puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) namun setelah dilakukan perubahan anggaran sepanjang tahun 2024, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 39.805.906.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan ratus Lima Juta Sembilan ratus Enam ribu rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp 2.869.365.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); sasaran strategis 2 sebesar Rp 3.542.936.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Sasaran strategis 3 sebesar Rp. 4.763.599.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Sasaran strategis 4 sebesar Rp. 5.378.821.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); Sasaran strategis 5 sebesar Rp. 634.750.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah); dan Sasaran strategis 5 sebesar Rp. 22.616.435.000,-

(dua puluh dua milyar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran), Inovasi dan Penghargaan yang Diperoleh Instansi selama Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Hasil penilaian evaluasi kinerja internal dijelaskan bahwa proses evaluasi internal yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berikut merupakan saran/rekomendasi beserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 1.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pemantauan capaian kinerja melalui rapat POK secara berkala dilengkapi dengan bukti yang memadai antara lain daftar hadir.	- Pelaksanaan Rapat POK telah secara berkala yaitu setiap bulan dengan kehadiran langsung dari Kepala Dinas dengan dibuktikan adanya daftar hadir yang menyatakan kehadiran pimpinan dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan Bukti Dukung pada link : https://s.id/BUKTIDUKUNG_TLHE_SAKIP_2024

2.	Menerbitkan Pakta Integritas kepada semua ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Tahun 2025 ditetapkan Pakta Integritas kepada semua ASN di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Bukti Dukung pada link : https://s.id/BUKTIDUKUNG_TLHE_SAKIP_2024
3.	Memfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> /penghargaan kepada pegawai berprestasi atau sub unit kerja yang berkinerja baik, didukung dengan juknis/kriteria yang jelas, serta dibentuk Tim oleh Kepala Dinas.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibentuk Tim dalam pemberian <i>reward</i>/penghargaan dan <i>Punishment</i> oleh Kepala dinas. - Telah disusun juknis dalam pemberian <i>reward</i>/penghargaan dan <i>Punishment</i> - Berdasarkan Bukti Dukung pada link : https://s.id/BUKTIDUKUNG_TLHE_SAKIP_2024

1.6 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah, maka telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk menindaklanjuti atas rekomendasi LKjIP dari tahun sebelumnya. Berikut merupakan rekomendasi beserta tindak lanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan program diversifikasi pangan pokok non beras dan pangan olahan lokal dengan penyediaan stimulan pangan berbasis sumber daya lokal dan alat pengolah pangan lokal untuk meningkatkan konsumsi pangan karbohidrat non beras	Telah terlaksananya kegiatan: - Fasilitasi alat pengembangan pengolahan pangan lokal kepada 25 kelompok
2.	Penyediaan stimulan kebun dan warung B2SA untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang lebih beragam serta melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan B2SA yang di integarsikan pada wilayah desa/kelurahan/lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat dan produktif.	Telah terlaksananya kegiatan: - Promosi dan edukasi pangan B2SA bagi generasi muda sebanyak 4 kali di sekolah SMA/SMK, Gerakan penganekaragaman pangan lokal sebanyak 1 kali, lomba kreasi olahan pangan lokal sebanyak 2 kali, pengenalan pangan lokal melalui mie mocaf, dan pameran pangan lokal sebanyak 9 kali. - Bantuan Warung B2SA yang diserahkan ke kelompok B2SA di 15 kabupaten/kota berupa MMT, Rak besi, Freezer, Vacuum Sealer, Showcase, Blender, dan Timbangan Digital.

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
3.	Menekan tingkat inflasi melalui serangkaian kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan berupa fasilitasi distribusi, subsidi harga pangan dan gerakan pangan murah pada komoditas pangan strategis (beras, telur, cabang dan bawang merah).	Telah terlaksananya kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Distribusi sebanyak 1.010,396 ton dengan komoditas beras, telur, cabai, bawang merah dan pangan lainnya; - Subsidi harga pangan untuk beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, bawang putih dan bawang merah. - Gerakan Pangan Murah sebanyak 3 kali di Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kabupaten Semarang
4.	Memperkuat cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu yang cepat akibat terjadinya rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat yang lain.	Cadangan provinsi yang disediakan sebanyak: <ul style="list-style-type: none"> - 788,090 ton gabah - 177.340 bungkus mie moca - 3.987 bungkus beras analog Cadangan pangan provinsi digunakan untuk kemiskinan, rawan pangan dan bencana alam serta telah terdistribusi sebanyak: <ul style="list-style-type: none"> - 286,945 ton beras - 147.480 bungkus mie moca - 3.116 bungkus beras analog
5.	Penyaluran bantuan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan dan stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Desa Rawan Pangan dan Gizi dengan pemberian paket bantuan pangan kepada Masyarakat berupa beras 5kg, telur ayam 1kg, daging ayam 1kg, dan susu instant 8 sachet di 22 desa (@50 RTM) sebanyak 9 kali. - Kegiatan Intervensi Desa Stunting dengan bantuan pangan kepada anak berisiko stunting sebanyak 8 kali selama 4 bulan di 15 desa. Paket bantuan pangan terdiri dari 2 paket yaitu: paket 1. (Beras Fortivit 3kg dan Telur ayam 2kg) dan paket 2 (Beras Fortivit 3 kg dan Daging ayam 2kg).
6.	Melakukan kajian manajemen <i>food waste</i> dan <i>food loss</i> dalam memerangi <i>food waste</i> dan <i>food loss</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan kajian manajemen <i>food waste</i> dan <i>food loss</i> pada bulan Agustus 2024 dengan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
7.	Melakukan pendataan pelaku usaha dan memperluas jaringan kerjasama promosi keamanan pangan dengan melibatkan instansi terkait dalam pendampingan dan pembinaan pelaku usaha terkait mutu dan keamanan PSAT sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melaksanakan pendampingan dan pelatihan higiene sanitasi kepada 18 kelompok dan pendampingan dalam penyusunan doksist kepada 10 kelompok. - Telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan kepada 450 orang dan menyebarluaskan informasi mutu dan keamanan pangan melalui berbagai media informasi seperti video dan iklan di radio.
<p>BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT atas LKJIP Tahun 2023 pada link : https://s.id/TL_LKJIP_DISHANPAN_2023</p>		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Tujuan

Mewujudkan ketahanan pangan jawa tengah dan Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu tiga tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya keterjangkauan/akses pangan, meningkatnya pemanfaatan pangan, meningkatnya kualitas manajemen risiko perangkat daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah		Indeks Ketahanan Pangan	82,73	82,74	82,75
	Meningkatkan Keterjangkauan / akses pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	5	6	7
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,5	94,6	94,7
	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	10	10	10
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.797	3.801	3.803
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82	83	84
	Meningkatnya	Indeks Kepuasan	82	83	84

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
	kualitas pelayanan perangkat daerah	Masyarakat			
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,94	2,95	2,96

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara atau wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik. Ketahanan pangan mencakup kemampuan untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat (maksimal 100). Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan yang ditunjukkan dengan indikator angka kecukupan energi (Kkal/kapita/hari); meningkatnya keterjangkauan/akses pangan yang ditunjukkan dengan indikator rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) dan persentase penanganan kecamatan rawan pangan; serta meningkatnya pemanfaatan pangan yang ditunjukkan dengan indikator Skor PPH Provinsi. Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Manajemen Risiko dan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Program Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator rata-rata ketercukupan pangan, rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi, rasio cadangan pangan masyarakat, persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku, rasio cadangan pangan masyarakat (DRP), angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah dan angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP); Meningkatkan penanganan kerawanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi; Meningkatkan pengawasan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dan persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan. Program yang berkaitan dengan kesekretariatan adalah penunjang urusan pemerintah daerah provinsi yang ditunjukkan dengan indikator persentase tingkat ketercapaian

kinerja perangkat daerah, persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah serta persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (BPMKP).

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan beserta indikator kerjanya disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83
		Meningkatkan Keterjangkauan / akses pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	5
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	skor	94,2
		Meningkatkan Keterjangkauan/ Akses Pangan	Rata-Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	9,4
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kapita/hari	3797
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,95

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya merata antar waktu antar wilayah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan	Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), penguatan cadangan pangan masyarakat, pembinaan penerapan jaminan mutu pangan dan penguatan promosi produk pangan berbasis sumber daya lokal.
2	Meningkatnya Keterjangkauan / Akses Pangan	1. Penanganan kerawanan pangan dan stunting 2. Penanganan food loss and waste 3. Pembangunan sistem distribusi yang efektif dan efisien	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	1. Promosi pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi berbasis sumber daya lokal 2. Pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kab/kota 3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPMK	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Perkantoran, Kepegawaian, dan keuangan administrasi pelayanan	
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 39.805.906.000,- terdiri atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 23.251.185.000,- dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebesar Rp 16.554.721.000,-. Pada LKjIP ini melaporkan Program urusan Bidang Pertanian yang terdiri atas 4 program dan 14 kegiatan (Tabel. 2.4)

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			10.207.756.000
		Rata-rata ketercukupan pangan	1,25	200.000.000
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,50	2.596.655.000
		Rasio cadangan pangan masyarakat	0	72.710.000
		Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	60%	4.395.000.000
		Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	0	71.570.000
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,80 Kkal/kapita/hari	2.019.757.000
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,80 Kkal/kapita/hari	852.064.000
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			5.545.000.000
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	1 kelompok	200.000.000
		PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	100%	1.525.000.000
		PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	5%	2.696.854.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	0%	173.143.670
		REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	1 Dokumen	950.000.000
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			2.740.935.000
		Persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	5%	2.596.655.000
		Persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat	0%	72.710.000
		Persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat (DRP)	0%	71.570.000
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			1.921.821.000
		PPH Kab / Kota > 87	33	1.069.757.000
		PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	33	852.064.000
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan			3.839.965.000
		Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01%	3.839.965.000
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			3.839.965.000
		PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	2,50%	3.839.965.000
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan			2.507.000.000
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat	80%	1.242.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		keamanan dan mutu pangan		
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80%	1.265.000.000
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.278.750.000
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN	1 Dokumen	305.000.000
		PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	15%	478.000.000
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	1 Dokumen	395.000.000
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	88,10	64.000.000
		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	2 Dokumen	1.265.000.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			22.181.230.000
		Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	733.545.000
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	19.993.435.000
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum,	100%	1.454.250.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100%	634.750.000
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	15.879.475.000
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			85.000.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen	45.000.000
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	1 Dokumen	40.000.000
	4.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan	10.000.000
	4.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%	292.780.000
	4.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.414.651.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%	1.218.651.000
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100%	196.000.000
	4.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.203.150.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	70 Unit	761.850.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	20 Unit	441.300.000
	4.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.472.500.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan	1.142.500.000
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	24 Laporan	330.000.000
	4.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.253.292.540
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	66 Unit	1.902.879.000
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	12 Unit	350.413.540

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya

Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Anggaran yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada Tabel Tabel 2.5

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83
	1.1 Meningkatnya ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/hari	3.797
	1.2 Meningkatnya Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	9,4
		Persentase penanganan kecamatan rawan pangan	%	5
	1.3 Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	94,5
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82
	2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82
	2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,95

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung tercapainya Kinerja yang optimal dan penerapan SAKIP yang baik sebagai perwujudan *good governance*, maka Dinas Ketahanan Pangan menggunakan instrumen pendukung dari Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, e-controlling, dan e-SHB yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja SKPD dan aplikasi SISLOGDA (Sistem Logistik Daerah) dan e-OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah).

Gambar 2.1
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

The image displays two screenshots of digital systems used by the Provincial Food Security Agency of Central Java. The top screenshot shows the SISLOGDA login interface, featuring a search bar with filters for 'Periode Tahun' (2025), 'Periode Bulan' (Februari), and 'Komoditas' (Beras), along with a 'Cari' button. Below the search bar are two large colored boxes for 'Harga Produsen' (red) and 'Harga Eceran' (purple), both showing '0' and 'Harga Hari Ini'. A 'Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan' chart is visible at the bottom. The bottom screenshot shows the e-OKKPD website header with navigation links: BERANDA, TENTANG KAMI, INFO LAYANAN, BASIS DATA, KONTAK KAMI, and LOGIN PELANGGAN. The main banner features a laboratory setting with the text 'LAYANAN ONLINE E-OKKPD PROVINSI JAWA TENGAH' and a 'UNDUH PANDUAN' button. The footer contains three service tiles: 'KELUHAN DAN SARAN' (with a complaint icon), 'INFO LAYANAN' (with a service flow icon), and 'REGULASI DAN INFO PUBLIK' (with a gavel icon).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Menindaklanjuti pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2024 – 2026. Maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. LKjIP disusun dengan memperhatikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2024. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (*Outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk *Benefit* dan *Impact* belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	≤ 50,99%	Sangat Rendah

Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, terdapat 2 tujuan dan 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2024, yaitu:

<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah
<p>Sasaran Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan Pangan 2. Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan 3. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83	85,34	102,81	83
	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	kcal/kapita/hari	3797	3805	100,21	3803
	2. Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	%	9,4	6,86	137,02	10
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	5	10,81	216,2	7
	3. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	Skor	94,2	93,6	99,04	94,7
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (PD)	Angka	82	80,85	98,59	82

1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,95	3,09	104,74	3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	91	110,97	84

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2024. Untuk mengukur capaian kinerja pada Kelima Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	83	85,34	102,81	Sangat Tinggi	BAPANAS
1.1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3797	3805	100,21	Sangat Tinggi	<i>e-controlling</i>
1.2	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	9,4	6,86	137,02	Sangat Tinggi	<i>e-controlling</i>
1.3		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	5	10,81	216,2	Sangat Tinggi	<i>e-controlling</i>
1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,2	93,6	99,04	Sangat Tinggi	BAPANAS
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (PD)	82	80,85	98,59	Sangat Tinggi	<i>e-controlling</i>
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,95	3,09	104,74	Sangat Tinggi	<i>e-controlling</i>

2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91	110,97	Sangat Tinggi	e-controlling
-----	------------------------------------	----------------------------	----	----	--------	---------------	---------------

Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2024 untuk tujuan I (pertama) yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Jawa Tengah Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan terealisasi sebesar 85,34 dari target 83 dengan capaian sebesar 102,81% dan termasuk kategori **Sangat Tinggi**. Tingginya capaian ini dikarenakan adanya program-program yang mendukung baik ketersediaan pangan di Jawa Tengah, stabilisasi pasokan pangan, akses pangan yang baik, menjamin keamanan pangan di Jawa Tengah dan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sasaran Pertama yang ingin dicapai pada tujuan pertama ini adalah Meningkatnya Ketersediaan Pangan dengan target sebesar 3797 kkal/kapita/hari telah tercapai. Sasaran ini mendapatkan capaian 100,21% yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Sasaran Kedua yang ingin dicapai pada tujuan pertama adalah Meningkatnya Keterjangkauan / Akses pangan dengan indikator kinerja rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) dengan target 6,86% dengan capaian 137,02% dengan kategori **Sangat Tinggi** dan indikator kinerja Persentase penanganan kecamatan rawan pangan dengan target sebesar 5% telah tercapai dan mendapatkan capaian 216,2% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Sasaran ketiga yang ingin dicapai pada tujuan pertama adalah meningkatnya pemanfaatan pangan dengan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi dengan target 94,5 dengan capaian 99,045 dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Pada Tujuan kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terealisasi sebesar 80,85 dari target 82 dengan capaian sebesar 98,59 dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan kedua ini antara lain Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Manajemen risiko dengan target 2,95 dan telah terealisasi sebesar 3,09 dengan capaian 104,745 dengan kategori **Sangat Tinggi**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memahami, mengelola dan mengurangi adanya risiko yang terjadi. Selain itu pada tujuan kedua juga memiliki sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan PD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 82 dan telah terealisasi sebesar 91. Sasaran ini mendapatkan capaian sebesar 110,974% yang termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Tingginya capaian ini dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang Sangat Tinggi melalui aspek akuntabilitas, layanan publik dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2022 dan 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2022-2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %	Target	Real.	Capaian %
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	83	85,34	102,81
1.1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3.731	3.797	101,77%	4020	4021	100,02%	3797	3805	100,21
1.2	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	4,50	2,14	210,28%	2	0,58	344,83%	9,4	6,86	137,02
1.3		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	1%	58,73	5873%	1	52,56	5256%	5	10,81	216,2
1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	88,44	94,4	106,73%	88.80	94,2	106,08%	94,2	93,6	99,04
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	82	80,85	98,59

2.1	Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko PD	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	2,944	-	2,95	3,09	104,74%
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	89,5	114,74%	76	91,5	120,39%	82	91	110,97%

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja tujuan 1 terealisasi pada tahun 2024 Sangat Tinggi. Indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator baru pada level tujuan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Merujuk pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pada tujuan kedua tercapai 98,59% belum sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan masih terdapat kelemahan pada monitoring dan evaluasi kegiatan yang rata-rata tidak dilakukan secara formal. Indikator tujuan kedua merupakan indikator baru pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi tujuan pertama pada sasaran pertama dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan disbanding dengan tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan disbanding tahun 2023. Sedangkan pada sasaran kedua pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Pada sasaran strategis ketiga, dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan terus menerus. Pada sasaran strategis keempat dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan terus menerus.

Realisasi tujuan kedua, sasaran pertama merupakan indikator baru akan tetapi pada tahun 2023 sudah ada nilai untuk Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,944 sehingga pada tahun 2024 terdapat target sebesar 2,95 yang telah tercapai dengan realisasi 3,09 (104,74%). Sedangkan pada sasaran strategis kedua pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 akan tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Akhir 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	85,34	82,75	103,13
1.1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3805	3803	100,05
1.2	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	6,86	10	145,77
1.3		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	10,81	7	154,43
1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	93,6	94,7	98,83
2	Meningkatkan Kualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80,85	84	96,25

	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah				
2.1	Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko PD	Indeks Manajemen Risiko	3,09	3	103
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	84	108,33

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan terdapat beberapa indikator yang melebihi target akhir Renstra yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Indikator tujuan pertama dan sasaran pertama, kedua dan ketiga mendapatkan hasil capaian yang melebihi dari target akhir Renstra dengan hasil 85,34 pada Indeks Ketahanan Pangan, 3805 pada indikator Angka kecukupan Energi, 6,86 pada Indikator rata-rat deviasi harga pangan strategis (beras) dan 10,81 pada indikator persentase penanganan kecamatan rawan pangan. Untuk sasaran keempat belum mencapai target dikarenakan terdapat beberapa komoditas pangan masih belum dikonsumsi secara ideal oleh masyarakat.

Pada tujuan dan sasaran kedua dapat dilihat melalui hasil Indeks reformasi Birokrasi yang belum mencapai target sesuai dengan target akhir renstra, akan tetapi untuk indikator Indeks Manajemen Risiko dengan hasil 3,09 melampaui target akhir renstra dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil 91 juga melampaui target akhir Renstra PD.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	83	85,34	102,81	Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), Ketersediaan Pangan, dan Distribusi Pangan yang merata di wilayah Jawa Tengah.	-
1.1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	3797	3805	100,21	Kegiatan Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Provinsi mengalami peningkatan	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						yang signifikan dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan CPP.	
1.2	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	9,4	6,86	137,02	Intervensi harga Pangan dan fasilitasi distribusi pangan berjalan dengan sesuai SOP dan terdapat penambahan anggaran karena dirasa cukup membantu masyarakat.	-
1.3		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	5	10,81	216,2	Penanganan daerah rawan pangan dengan bantuan yang diberikan cukup menjadikan penurunan level daerah rawan pangan. Kecamatan Rawan Pangan pada Tahun 2023 sebanyak 37 kecamatan, tahun 2024 kegiatan intervensi yang dilaksanakan di 4 kecamatan.	-
1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,2	93,6	99,04	Terdapat beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatkan konsumsi idealnya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan	Upaya yang dilakukan melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	82	80,85	98,59	Terdapat beberapa instrumen yang belum maksimal. Salah satunya yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang ada.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
2.1	Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko PD	Indeks Manajemen Risiko	2,95	3,09	104,74%	Terdapat peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan	-
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	91	110,97%	Terdapat peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	-

Dari tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Sangat Tinggi. Tujuan I (pertama) berupa Indeks Ketahanan Pangan melebihi 100%, yaitu 106,08%. Hal tersebut karena program-program yang mendukung baik ketersediaan pangan di Jawa Tengah, stabilisasi pasokan pangan,

akses pangan yang baik, menjamin keamanan pangan di Jawa Tengah dan promosi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Selain itu pada sasaran I (pertama) yaitu Angka Kecukupan Energi terealisasi sebesar 3.805 dengan capaian 100,21%. Tercapainya sasaran pertama dikarenakan Kegiatan Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Provinsi mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan CPP. Sasaran Kedua yaitu Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) terealisasi 6,86 (137,02) dikarenakan Intervensi harga Pangan dan fasilitasi distribusi pangan berjalan dengan sesuai SOP dan terdapat penambahan anggaran karena dirasa cukup membantu masyarakat. Sasaran Ketiga yaitu Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan terealisasi 10,81 (216,2%) dikarenakan Penanganan daerah rawan pangan dengan bantuan yang diberikan cukup menjadikan penurunan level daerah rawan pangan. Sasaran Keempat yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi terealisasi 93,6 (99,04) dikarenakan masih perlu adanya peningkatan konsumsi ideal terutama pada komoditas umbi-umbian, buah/biji berminyak dan kacang-kacangan.

Pada Tujuan II (kedua) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi terealisasi dengan nilai 80,85 dari target 82. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh terdapat beberapa instrumen yang belum maksimal. Salah satunya yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang ada. Pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko PD dengan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko terealisasi dengan nilai 3,09 dari target 2,95 dan memiliki tingkat ketercapaian kinerja sebanyak 104,74% dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memahami, mengelola dan mengurangi adanya risiko yang terjadi. Pada sasaran kedua yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan PD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi dengan nilai 91 dari target 82 dan tingkat capaian sebesar 110,97% dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang Sangat Tinggi melalui aspek akuntabilitas, layanan publik dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penganggaran Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	83	85,34	102,81	16.554.721.000	16.468.736.012	99,48	0,52%
1.1	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	3797	3805	100,21	2.869.365.000	2.867.944.221	99,95	0,05%

1.2	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	9,4	6,86	137,02	3.542.936.000	3.541.775.255	99,96	0,04%
1.3		5	10,81	216,2	4.763.599.000	4.752.087.662	99,75	0,25%
1.4	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	94,2	93,6	99,04	5.378.821.000	5.306.928.874	98,66	1,34%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	82	80,85	98,59	23.251.185.000	22.278.470.012	95,81	4,19%
2.1	Meningkatnya kualitas Manajemen Risiko PD	2,95	3,09	104,74%	634.750.000	633.026.279	99,72	0,28%
2.2	Meningkatnya kualitas Pelayanan PD	82	91	110,97%	22.616.435.000	21.645.443.733	95,70	4,30%

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (\sum) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (\sum) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran I
RAKi : Realisasi anggaran keluaran I
CKi : Capaian keluaran I

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hasil penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu semua tujuan dan sasaran terdapat efisien anggaran. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 22 /PMK.02/2021 Tahun 2021, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka

dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2024.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pangan	102,81				Menunjang
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Kecukupan Energi	100,21				Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rata-rata ketercukupan pangan	160	Menunjang
					Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provins	130	Menunjang
					Rasio cadangan pangan masyarakat	100	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	100	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	300	Menunjang
					PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	100	Menunjang
	Meningkatkan Keterjangkauan /Akses Pangan	Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras)	137,02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	140	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	PROSENTASE SASARAN STABILISASI	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	HARGA SESUAI DENGAN SOP		
					PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	300	Menunjang
					PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	100	Menunjang
		Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	216,2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan pangan dan gizi	1200	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	300	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	100	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	100	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	100	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	103,03	Menunjang
	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	99,04	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	100	Menunjang
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan	PPH KAB/KOTA > 87	103,03	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	100	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	118,24	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	100	Menunjang
					PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	100	Menunjang
					JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	100	Menunjang
					Persentase produk pangan segar terregistrasi yang diawasi di peredaran	135,54	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	113,75	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	100	Menunjang
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	98,59	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan, dan	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian PD	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	Menunjang
				Administrasi Umum PD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik	Jumlah jenis dokumen	100	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
				Daerah pada PD	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP		
				Administrasi Umum PD	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	100	Menunjang

a. Capaian Target Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang optimal, efektif, dan tepat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan memiliki program dan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan antara lain Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada tabel 3.8 di atas disampaikan bahwa capaian pada 4 program dan 14 kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah capaian dibawah 100%, tercapai 100% dan yang melampaui 100%.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 7 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Rata-rata kecukupan pangan dengan target 1,25 terealisasi 2, Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan target 0,50 terealisasi sebesar 0,65, Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 60% terealisasi sebesar 84%. Adapun indikator yang memiliki capaian 100% yaitu rasio cadangan pangan masyarakat dengan target 0 dan

teralisasi 0,80, rasio cadangan pangan masyarakat (DRP) dengan target 0 teralisasi 0,80, angka konsumsi beras Provinsi Jawa tengah dengan target 87,80 teralisasi 87,80, dan angka konsumsi beras Provinsi Jawa tengah (DRP) dengan target 87,80 teralisasi 87,80. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal. Seluruh indikator kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat telah tercapai sesuai target akhir RPD yang telah ditetapkan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 1 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi dengan target 0,01% telah teralisasi sebesar 0,12%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri.

Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki realisasi capaian di atas 100%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target 80% telah teralisasi sebesar 94,59% dan Persentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 80% telah teralisasi sebesar 91%. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan agar produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki realisasi capaian 100%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat capaian sangat tinggi.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah, Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah, dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP. Pada tahun 2024

ketiga indikator tersebut dengan target sebesar 100% telah terealisasi. Program ini tidak ditemukan permasalahan sehingga dapat dikatakan indikator kinerja tersebut menunjang program/kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan dengan optimal dan telah tercapai sesuai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan. Manfaat program ini bertujuan dalam rangka menunjang terlaksana dan tersedianya serta terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi keuangan dan penunjang pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan.

b. Capaian Target Kinerja Output Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan didukung oleh 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dan Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan, prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP, persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga, persentase peningkatan kapasitas usaha pada lembaga usaha pangan masyarakat, dan rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan dari target 1 Dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target keluaran 12 Dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Laporan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan strategis selama 12 bulan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2024. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.674.330,- atau telah terserap 99,83 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi dengan indikator Jumlah Informasi Harga Pangan dengan target 12 Dokumen terealisasi 100% dan indikator

jumlah intervensi harga pangan dengan target 3 paket terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.524.653.600,- atau terserap 99,98 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan presentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga dari target 5% tercapai dengan tingkat capaian 300%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan indikator kinerja volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan dengan target 950 ton terealisasi 1.010,40 ton dan indikator kinerja jumlah dokumen pelaksanaan pendistribusian pangan melalui sistem logistik daerah dengan target 13 dokumen terealisasi 100%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan melakukan pengembangan SISLOGDA, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- 2) Penguatan sarana prasarana pendukung SISLOGDA;
- 3) Fasilitasi distribusi pangan; dan
- 4) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 2.696.854.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.695.239.385,- atau telah terserap 99,94%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kegiatan persentase peningkatan kapasitas usaha pada lembaga usaha pangan masyarakat dari target 0% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan indikator kinerja lembaga usaha pangan masyarakat yang difasilitasi dengan target 0 terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 173.146.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 172.143.670,- atau terserap 99,99 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun dari target 1 Dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator kinerja jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal yang difasilitasi dengan target 25 kelompok terealisasi sebesar 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 950.000.000,- dengan realisasi anggaran

Rp. 937.264.270,- atau terserap 98,66 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi, persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat, persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat (DMP).

Realisasi indikator kegiatan persentase peningkatan volume cadangan pemerintah provinsi pangan dari target 5% tercapai dengan tingkat capaian 300%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan target keluaran 520 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disediakan terealisasi 581,18 ton (tingkat capaian 111,77%), sebagaimana terinci dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2023	599.690	5.100
2	Pengadaan Tahun 2024	188.400	-
3	Jumlah CPP Dikelola Tahun 2023	788.090	-
4	Jumlah gabah digiling	512.590	284.925
5	Jumlah distribusi beras	-	284.925
6	Penyusutan	-	585
7	Stock Per 30 Desember 2024	275.500	2.495

Selain itu juga terdapat cadangan pangan berupa mie mocaf dengan jumlah stok hingga Desember 2024 sebanyak 29.850 bungkus dan cadangan pangan berupa beras analog dengan jumlah stok hingga Desember 2024 sebanyak 871 bungkus. Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.596.655.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.595.559.891,- atau terserap 99,96 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat dari target 0% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan indikator kinerja lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi/dibina dengan target 100 kelompok terealisasi sebesar 379

kelompok. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 72.710.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 72.710.000,- atau terserap 100 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase penyaluran cadangan pangan masyarakat (DRP) dari target 0% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan indikator kinerja lumbung pangan masyarakat di desa rawan pangan yang difasilitasi/dibina dengan target 100 kelompok terealisasi sebesar 209 kelompok. Kegiatan ini didukung dengan anggaran Rp. 71.570.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 71.570.000,- atau terserap 100 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara PPH Kab/Kota > 87 dan PPH Kab/Kota > 87 (DRP)

Realisasi indikator kegiatan PPH Kab/Kota > 87 dari target 33 tercapai dengan tingkat capaian 103,03%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator kinerja jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal dengan target 10 lokasi terealisasi 100% dan indikator jumlah paket bahan pangan lokal yang dibagikan/dibantukan dengan target 2.250 paket terealisasi 2.272 paket sehingga tingkat capaian 100,98%;

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan 2 target keluaran: (I) 3 desa B2SA yang difasilitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100%; (II) 1 laporan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) yang disusun telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 1.069.757.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.066.369.000,- atau terserap 99,68 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan PPH Kab/Kota > 87 (DRP) dari target 33 tercapai 34 dengan tingkat capaian 103,03%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan target keluaran 12 desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi telah tercapai 100%. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp. 852.064.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 851.261.400,- atau terserap

99,90 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah persentase penanganan daerah rawan pangan. Realisasi indikator kegiatan prosentase penanganan daerah rawan pangan dan gizi dari target 2,50% tercapai 12,12 dengan tingkat capaian 300%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan target keluaran 22 desa rawan pangan dan gizi yang difasilitasi, 15 desa stunting yang diintervensi, 1 laporan Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dan 1 dokumen manajemen food loss dan atau food waste telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.839.965.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.829.256.262,- atau terserap 99,72 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Pengawasan Keamanan Pangan didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun*, Prosentase kelompok/pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya, jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun**, persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran dan jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun* dari target 1 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan indikator jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan. Target 300 orang dan terealisasi sebanyak 450 orang sehingga tingkat capaian 150%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 305.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 302.364.400,- atau terserap 99,14 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan Prosentase kelompok/pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya dari target 15% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan mutu Pangan Segar Asal tumbuhan dengan target keluaran 18 kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi telah tercapai dengan tingkat capaian 100% dan indikator kinerja jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu dengan target 7

kelompok terealisasi 10 kelompok dengan tingkat capaian 142,86%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 478.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 462.803.950,- atau terserap 96,82 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun** dari target 1 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan sear asal tumbuhan dengan indikator jumlah sampel pangan segar yang diawasi target keluaran 300 sampel telah tercapai 574 sampel dengan tingkat capaian 191,33%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 391.071.323,- atau terserap 99 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran dari target 65% tercapai 88,10% dengan tingkat capaian 135,54%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan sear asal tumbuhan dengan hasil 2 keluaran 46 lokasi dari target 40 lokasi telah tercapai dengan tingkat capaian 115%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 63.820.500,- atau terserap 99,72 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Realisasi indikator kegiatan jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai dari target 2 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan target keluaran 55 sertifikat dengan tingkat capaian 119 sertifikat (216,36%). Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dengan indikator kinerja jumlah sampel pangan yang diuji target 150 sampel telah terealisasi 509 sampel dengan tingkat capaian 339,33%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.265.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.231.974.031,- atau terserap 97,39 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh 7 kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan. Realisasi indikator kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun dari target 1005 tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 8 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 341.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 339.742.744,- atau terserap 99,63%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen perencanaan yang terdiri atas dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dan dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, indikator kinerja kegiatan ini juga didukung oleh sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 18 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 293.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 293.283.535,- atau terserap 99,84%, dengan tercapainya target penyusunan dokumen evaluasi yang terdiri atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draf laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 dan dokumen evaluasi lainnya.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun dari target 3 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 93 orang telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 15.138.475.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.491.169.136,- atau terserap 95,72%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Selanjutnya juga didukung oleh sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp

341.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 326.400.000,- atau terserap 95,72%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Dan serta didukung oleh sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 399.030.423,- atau terserap 99,76%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dan Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dari target 2 dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 2 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 25.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.964.381,- atau terserap sebesar 99,86%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik. Kegiatan tersebut juga didukung oleh Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 laporan dan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.185.500,- atau terserap sebesar 90,93%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP dengan target 1 dokumen tercapai 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 40.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.382.494,- atau terserap 95,96%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah. Realisasi indikator kegiatan Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dari target 1 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan target 4 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp 9.958.500,- atau terserap 99,56%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut adalah Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan. Realisasi indikator kegiatan Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan target 1 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 52.780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.751.000,- atau terserap 94,26%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Kegiatan tersebut juga didukung oleh sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dari target 12 Dokumen tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 240.000.000,-,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 206.623.990,-,- atau terserap 86,09%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik

6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan dan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 117.151.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 116.741.964,- atau terserap 99,65%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 84.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 79.200.000,- atau terserap 93,73%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 96.974.400,- atau terserap 96,98%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar

Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 96.126.000,- atau terserap 96,13%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 620.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 619.663.103,- atau terserap 99,95%. Selanjutnya sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 1 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.685.000,- atau terserap 91,24%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 12 dokumen telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 182.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 178.990.400,- atau terserap 98,35% dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP dari target 100% tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- atau terserap 100%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 101.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 100.632.200,- atau terserap 99,64%. Selanjutnya didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 12 paket telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.922.800,- atau terserap 99,61%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.650.000,- atau terserap 98,25%. Sub kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 35.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.412.200,- atau terserap 95,47% dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan dan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan dari target 70 unit tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 70 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 761.850.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 739.478.000,- atau terserap sebesar 97,06%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP dengan target 20 unit tercapai 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 20 unit dan terealisasi 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 441.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 345.495.000,- atau terserap 78,30%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik dan efisien.

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dari target 36 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 6.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,- atau terserap 66,67%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 370.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 346.031.536,- atau terserap 93,40%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 766.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 764.575.296,- atau terserap 99,81%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP dari target 24 laporan tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 180.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 175.092.794,- atau terserap 97,27%. Indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 12 laporan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 149.997.600 atau terserap 99,99%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari kegiatan tersebut antara lain Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan dan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan dari target 66 unit tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 24 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 250.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 239.921.300,- atau terserap 95,97%. Sub kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini selanjutnya yaitu pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 2 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 1.554.879000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.474.325.276,- atau terserap 94,82%. Dan terakhir, indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 40 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 98.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 96.650.000,- atau terserap 98,62%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

Realisasi indikator kegiatan Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP dari target 12 unit tercapai dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 unit telah tercapai dengan tingkat capaian

100%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp 306.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 303.720.000,- atau terserap 99,25%. Dan juga didukung oleh sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 16 unit dari target 10 unit telah tercapai dengan tingkat capaian 160%. Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.693.540,- atau terserap 93,39%, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut terlaksana dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan APBD sebesar Rp 39.805.906.000,-, namun setelah dilakukan perubahan anggaran, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp 40.421.263.000,- (empat puluh milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terserap sebesar Rp. 38.747.206.024,- (97,34%) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 36.060.597.524,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 2.686.608.500,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10.207.756.000	10.187.445.546	99,80
	1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5.744.674.330	5.529.975.255	96,26
	1.2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.740.395.000	2.739.839.891	99,98
	1.3 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.921.821.000	1.917.630.400	99,78

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.839.965.000	3.829.256.262	99,72
	2.1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	3.839.965.000	3.829.256.262	99,72
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.507.000.000	2.452.034.204	97,80
	3.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.507.000.000	2.452.034.204	97,80
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.251.185.000	22.278.470.012	95,81
	4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	634.750.000	633.026.279	99,73
	4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.879.475.000	15.216.599.559	95,83
	4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.000.000	81.532.375	95,92
	4.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.000.000	9.958.500	99,58
	4.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.780.000	256.374.990	87,56
	4.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.414.651.000	1.394.997.967	98,61
	4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.150.000	1.084.973.000	90,18
	4.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.500.000	1.439.697.226	97,78
	4.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.258.879.000	2.161.310.116	95,68

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan, anggaran sebesar Rp. 39.805.906.000,- terserap Rp. 38.747.206.024,- (97,34%). Sisa anggaran Rp. 1.058.699.979,- (2,66%) berasal dari:

- a. Sisa dana insentif daerah terkait subsidi harga sebesar Rp 900,-;
- b. Sisa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 661.905.864,- dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang pensiun;

- c. Sisa belanja barang dan jasa sebesar Rp 197.451.712,- dikarenakan adanya efisiensi sesuai kebutuhan;
- d. Sisa belanja modal sebesar Rp 199.341.500,- dikarenakan sisa mati pengadaan.

Realisasi serapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 97,34% dapat dikategorikan **Sangat Tinggi**, capaian tersebut turun dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 98,09%.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

3.3 Inovasi

Dalam rangka stabilisasi harga ataupun pengendalian inflasi khususnya pangan, maka diperlukan adanya program untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau yaitu Kios Pangan Murah. Kios Pangan Murah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi harga bahan pokok. Di banyak daerah, fluktuasi harga pangan bisa sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama pada musim-musim tertentu atau saat terjadi kelangkaan barang. Melalui kios pangan murah, pemerintah dapat memastikan ketersediaan barang dengan harga yang stabil, sekaligus mengurangi dampak negatif dari lonjakan harga yang dapat membebani keluarga miskin. Selain itu, kios ini juga sering dijalankan dengan konsep yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan percaya. Dengan adanya kios pangan murah, harga barang-barang kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya dijual dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, sehingga memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, memfasilitasi biaya operasional pendistribusian pangan dari penyedia ke masing-masing kios. Biaya tersebut meliputi transportasi, bongkar muat dan kemasan. Besaran biaya Rp. 1.200,-/kg untuk beras dan Rp. 2.000,-/kg untuk telur ayam, kemudian Rp. 500,-/kg untuk bahan pabrikan dalam kemasan (minyak goreng dan gula pasir).

Komoditas tersebut dipilih karena memang merupakan bahan pangan strategis yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat serta masih memungkinkan untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu pada suhu ruang. Selain itu, mengingat mayoritas Kios Pangan Murah ada di lokasi miskin/rawan pangan, dipilih telur karena dapat meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat yang harganya lebih terjangkau dibanding sumber protein hewani lainnya. Untuk bahan pangan yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, daging ayam dan daging sapi tidak

disarankan untuk disediakan di Kios Pangan Murah karena sebagian besar Kios Pangan Murah belum memiliki Sarana Prasarana Penyimpanan yang memadai.

Pada tahun 2024, telah terbentuk 30 Kios Pangan Murah yang tersebar di 28 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terutama daerah miskin sehingga pada tahun 2024 ini bertambah jumlahnya menjadi 368 kios, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi mengingat Kios Pangan Murah disinergikan dengan kegiatan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah. Sebaran Kios Pangan Murah di Jawa Tengah sebagaimana pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sebaran Kios Pangan Murah di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah KPM
1	Kabupaten Banjarnegara	2
2	Kabupaten Banyumas	21
3	Kabupaten Batang	1
4	Kabupaten Blora	12
5	Kabupaten Brebes	23
6	Kabupaten Cilacap	12
7	Kabupaten Demak	15
8	Kabupaten Grobogan	1
9	Kabupaten Jepara	10
10	Kabupaten Kebumen	27
11	Kabupaten Kendal	6
12	Kabupaten Klaten	32
13	Kabupaten Kudus	4
14	Kabupaten Magelang	13
15	Kabupaten Pati	17
16	Kabupaten Pekalongan	1
17	Kabupaten Pemasang	11
18	Kabupaten Purbalingga	14
19	Kabupaten Purworejo	27
20	Kabupaten Rembang	35
21	Kabupaten Semarang	2
22	Kabupaten Sragen	16
23	Kabupaten Sukoharjo	9
24	Kabupaten Tegal	2
25	Kabupaten Temanggung	1
26	Kabupaten Wonogiri	43
27	Kabupaten Wonosobo	5
28	Kota Semarang	6
	Grand Total	368

3.4 Penghargaan

Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan beberapa penghargaan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 28 September 2024 mendapatkan penghargaan pada Anugerah IDAFLW (International Day of Awareness of Food Loss and Waste) 2024 sebagai Dinas paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan.

Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Dinas paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan Tahun 2024



2. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 23 Juli 2024 mendapatkan penghargaan sebagai provinsi Terbaik II Nasional dalam Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) Provinsi Tahun 2023.

Gambar 3.2 Penerimaan Penghargaan SPHP Award Tahun 2024



3. Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan sebagai daerah penyalur bantuan pangan pada Program Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah untuk Pengentasan Stunting Tahun 2024 oleh Badan Pangan Nasional.

Gambar 3.3 Penerimaan Penghargaan Daerah Penyalur Bantuan Pangan



- Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 15 Februari 2024 sebagai Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Program Kedeputian Bidang Pangan dan Keamanan Pangan.

Gambar 3.4 Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pelaksanaan Program Kedeputian Bidang Pangan dan Keamanan Pangan



- Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 15 Februari 2024 sebagai Provinsi Terbaik Pertama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2023.

Gambar 3.5 Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2024



- Dinas Ketahanan Pangan dinobatkan oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 15 Februari 2024 sebagai Provinsi Terbaik 3 dalam Capaian Skor PPH Provinsi Tahun 2023 dengan skor 94,22.

Gambar 3.6 Penerimaan Penghargaan Provinsi Terbaik 3 dalam Capaian Skor PPH Provinsi Tahun 2023



7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih prestasi membanggakan dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Business Matching 2024 di Surakarta, 6 Agustus 2024. Dinas ini dinobatkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan belanja persentase tertinggi di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.7 Penerimaan Penghargaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan belanja persentase tertinggi di tingkat Provinsi Jawa Tengah



8. Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 Oktober 2024 dinobatkan sebagai Kepala Daerah yang Memiliki Komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Nasional (JP2GI).

Gambar 3.8 Penerimaan Penghargaan Kepala Daerah yang Memiliki Komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja **tujuan 1** mewujudkan ketahanan pangan jawa tengah tercapai sebesar **102,81%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - b. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatkan ketersediaan pangan tercapai sebesar **100,21%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - c. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatkan keterjangkauan/akses pangan tercapai sebesar **137,02%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - d. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatkan keterjangkauan/akses pangan tercapai sebesar **216,2%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - e. Capaian kinerja **sasaran 4** meningkatkan pemanfaatan pangan tercapai sebesar **99,04%** atau kategori **Sangat Tinggi**,
 - f. Capaian kinerja **tujuan 2** meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah tercapai sebesar **98,6%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - g. Capaian kinerja **sasaran 5** meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah tercapai sebesar **104,74%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
 - h. Capaian kinerja **sasaran 6** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **110,97%** atau kategori **Sangat Tinggi**.
2. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 antara lain:
 - a. Penurunan konsumsi beras namun belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi komoditas pangan lainnya secara beragam seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.
 - b. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih terbatas.
 - c. Terjadinya gejolak harga akibat inflasi pada wilayah tertentu di tingkat produsen dan konsumen, fluktuasi pasokan pangan pokok strategis dan rantai pasok yang cukup panjang dari produsen ke konsumen.
 - d. Masih adanya daerah rawan pangan dan anak stunting di Jawa Tengah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan bencana alam.
 - e. Minimnya kajian tentang *food waste* dan *food loss*.

- f. Terbatasnya data pelaku usaha Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan kelompok tani organik serta perlu adanya kerjasama dengan instansi lain dalam mempromosikan keamanan pangan segar.
- g. Masih banyak beredarnya pangan segar asal tumbuhan yang belum aman karena belum tersertifikasi.

B. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Subsidi Harga Pangan untuk penanganan daerah rawan pangan pada daerah dengan *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi di Kabupaten (Purworejo, Grobogan, Kebumen dan Banjarnegara) dan penanganan stunting di daerah dengan angka stunting tinggi di Kabupaten (Pemalang, Brebes, Banyumas dan Magelang).
2. Subsidi harga pangan untuk Produsen dan Konsumen guna untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah yang mengalami inflasi.
3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui pengadaan cadangan pangan provinsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Januari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. DYAN LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, M.M.

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 29 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, M.M.

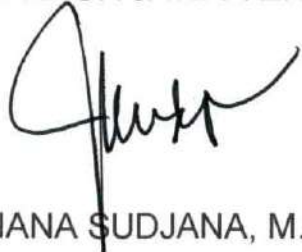
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 10.207.756.000	APBD
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 2.507.000.000	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 3.839.965.000	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 23.251.185.000	APBD
5. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 8.914.309.000	APBN
6. Program Dukungan Manajemen	Rp 221.656.000	APBN

Semarang, 29 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554

Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDIN, S.E.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PIU SEKRETARIS DINAS**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tercapainya kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %
2.	Terselenggaranya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 21.887.885.000	APBD
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 221.656.000	APBN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, November 2024
PIU SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO SULISTIYANTO, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BURHANUDIN, S.E.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010


EKO SULISTIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19670116 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan
2.	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket
3.	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan

		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen
4.	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
5.	Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	66 Unit
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 Unit
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 Unit

6.	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	70 Unit
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	70 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 45.000.000	APBD
1.	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 25.000.000	APBD
2.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20.000.000	APBD
B.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 292.780.000	APBD
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 240.000.000	APBD
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 52.780.000	APBD
C.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.218.651.000	APBD
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 117.151.000	APBD
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 84.500.000	APBD

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	100.000.000	APBD
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	100.000.000	APBD
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	620.000.000	APBD
6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	15.000.000	APBD
7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	182.000.000	APBD
D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.142.500.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	6.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	370.500.000	APBD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	766.000.000	APBD
E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.902.879.000	APBD

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	250.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	1.554.879.000	APBD
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	98.000.000	APBD
F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	761.850.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	761.850.000	APBD

Plt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

Ungaran, November 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



EKO SULISTIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19670116 199403 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDIN, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BURHANUDIN, S.E.
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Orang
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
		Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan
2.	Tersusunnya laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	15.879.475.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	15.138.475.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	341.000.000	APBD
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	400.000.000	APBD
B. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp	10.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Rp	10.000.000	APBD

Pt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

Ungaran, November 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN


BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BURHANUDIN, S.E.

Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DINAS
KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

BURHANUDIN, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19670306 199103 1 010

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19810925 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 634.750.000	APBD
3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 341.000.000	APBD
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 293.750.000	APBD

Pt. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


BURHANUDIN, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19670306 199103 1 010

Ungaran, November 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM


Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19810925 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPi

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006


URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan dan Gizi	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	0.01 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 3.839.965.000	APBD
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.344.100.000	APBN

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

Pihak Pertama,
**Pt. KEPALA BIDANG
 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661016 199203 2 006


URIP ARIANI SETYORAHAYU, SPI
 Penata Tingkat I
 NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 0925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : FIRDAUS ELIYAKA S., SP., M.Si.
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan Dan Gizi
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, November 2024

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KEWASPADAAN PANGAN DAN

GIZI

FIRDAUS ELIYAKA S., SP., M.Si.
Pembina
NIP. 19721001 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KETUA KELOMPOK KERJA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	2.5%
		Jumlah Desa Stunting yang Diintervensi	15 Desa
		Tersusunnya Peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Rp 998.000.000	APBD

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, November 2024

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
DAN GIZI

FIRDAUS ELIYAKA S, SP, M.Si.
Pembina
NIP. 19721001 200604 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kerawanan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, November 2024
Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERAWANAN PANGAN

URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KETUA KELOMPOK KERJA KERAWANAN PANGAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertanganinya Desa Rawan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	2.5%
		Tersusunnya Dokumen Menejemen Food Loss dan Atau Food Waste	1 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Rp 406.000.000	APBD

Pihak Kedua,
PIL. KEPALA BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002

Ungaran, November 2024

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERAWANAN PANGAN



URIP ARIANI SETYORAHAYU, S.Pi
Penata Tingkat I
NIP. 19681104 199403 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishannan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BROTO RINI, S.P., M.P.

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, November 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN

SRI BROTO RINI, S.P., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja : BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stabilnya Harga Komoditas Pangan Strategis	Persentase Komoditas Pangan Strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	60%
2.	Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat	0 Angka
3.	Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	Rasio Cadangan Pangan Masyarakat (DRP)	0 Angka
4.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rasio Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	0,50 Angka
5.	Tercukupinya Pangan Masyarakat di Jawa Tengah	Rata-rata Ketercukupan Pangan	1,25 Angka

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 7.335.935 000	APBD
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 8.914.309 000	APBN

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN



SRI BROTO RINI, S.P., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERDINI NUR AIRIANIK, S.T.P., M.Si.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Distribusi dan Cadangan Pangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI, S.P., M.P.

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN

SRI BROTO RINI, S.P., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Ungaran, November 2024
Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
DISTRIBUSI DAN CADANGAN
PANGAN

HERDINI NUR AIRIANIK, S.T.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19830228 200604 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja : KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas usaha pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas usaha pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	0% 10 Kelompok
2.	Meningkatnya Volume Bahan Pangan yang Didistribusikan untuk Stabilisasi Harga	Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan yang Didistribusikan untuk Stabilisasi Harga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Distribusi Pangan Melalui Sistem Logistik Daerah Volume Bahan Pangan Yang Difasilitasi Pendistribusiannya Untuk Stabiisasi Pasokan	5% 13 Dokumen 950 Ton
3.	Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat Lumbung Pangan Masyarakat Yang Difasilitasi/Dibina	0% 100 Kelompok
4.	Meningkatnya Volume Cadangan Pemerintah Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Cadangan Pemerintah Provinsi Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Yang Dikelola	3% 520 Ton
5.	Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (DMP)	Persentase Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat (DMP) Lumbung Pangan Masyarakat Di Desa Rawan Pangan Yang Difasilitasi/Dibina	0% 100 Kelompok

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp 2.870.000.000	APBD
2 Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp 2.740.935.000	APBD

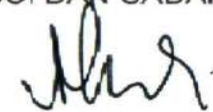
Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**



SRI BROTO RINI, S.P.,M.P.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
**KETUA KELOMPOK KERJA
 DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**



HERDINI NUR AIRIANIK, S.T.P., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19830228 200604 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHANI SARDONO WIYOTO, S.T.P., M.M.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI BROTO RINI, S.P., M.P.

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI
PANGAN


SRI BROTO RINI, S.P., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700520 199503 2 002

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN


DHANI SARDONO W., S.T.P., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19801017 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

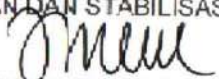
Unit Kerja : KELOMPOK KERJA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai dengan SOP	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai dengan SOP	100%
		Jumlah Informasi Harga Pangan	12 Dokumen
		Jumlah intervensi harga pangan	3 Paket

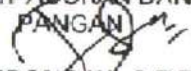
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1 Sub Kegiatan Stabiliisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Rp 1525.000.000	APBD

Ungaran November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN


SRI BROTO RINI, S.P., M.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 197005201995032002

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN


DHANI SARDONO W., S.T.P., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 19801017 201001 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Ungaran, November 2024

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN


LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja : BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkurangnya Konsumsi Beras Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87.8 Kg/Kap/Th
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87.8 Kg/Kap/Th

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 2.871.821.000	APBD
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 1.138.000.000	APBN

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN



LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt, MM.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Pangan Lokal
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUCIA SRI WINARNI SUSILOWATI, SE, M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN

LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19861126 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal	Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Pangan Lokal yang Disusun Jumlah kelompok / Pelaku Usaha Pengembangan Pangan Olahan Lokal dan Pangan Pokok Lokal yang Difasilitasi	1 Dokumen 25 Kelompok

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		
1 Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 950.000.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN



LUCIA SRI WINARNI S. SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700907 199903 2 007

Ungaran November 2024

Pihak Pertama
KETUA KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL



FERRY AGUS SETIAWAN, S.Pt. MM
Perata Tingkat I
NIP. 19861126 201101 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN

LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024


Unit Kerja : BIDANG KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80%


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 1.242.000.000	APBD
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 8.914.309.000	APBN

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN


LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETI SETYO MAHANANI, S.P.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kerjasama Keamanan Pangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN

LISTYA PUSPITASARI, SP, M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERJASAMA KEAMANAN PANGAN

NETI SETYO MAHANANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19820626 201001 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024


Unit Kerja : KELOMPOK KERJA KERJASAMA KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	300 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
1 Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 305.000.000	APBD

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN


LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KERJASAMA KEAMANAN PANGAN


NETI SETYO MAHANANI, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19820626 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972, 6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.P.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kelembagaan Keamanan Pangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN

LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19780715 201001 2 019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KELEMBAGAAN KEAMANAN
PANGAN

ZAENAL ARIFIN, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 19851016 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024


Unit Kerja : **KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN**

No (1)	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase Kelompok/Pelaku Usaha yang Penerapan Higiene Sanitasinya Meningkatkan Levelnya	15%
		Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	7 Kelompok
		Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina dalam Penerapan Higiene Sanitasi	18 Kelompok

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
1 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Rp 478.000.000	APBD

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
KEAMANAN PANGAN


LISTYA PUSPITASARI, S.P., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 197807152010012019

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA
KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN


ZAENALARIFIN, S.P.
Penata Tingkat I
NIP. 198510162009031006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARSO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SUHARSO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19690302 133103 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Pt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengukur rata-rata dari tingkat ketercapaian kegiatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	100 %
2.	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80 %
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai ISO 17065 dan ISO 17025	Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	2 Dokumen
		Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	55 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :	Rp 1.363.300.000	APBD
B. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 1.265.000.000	APBD
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 615.000.000	APBD

Sub Kegiatan

1. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan
Segar Asal Tumbuhan

Anggaran

Rp 615.000.000

Keterangan

APBD

Ungaran, November 2024
Pit. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

SUHARSO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19690302 133103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARSO, S.P., M.Si.

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengujian Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARSO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

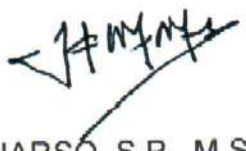
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN


SUHARSO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

Pihak Pertama,
KETUA KELOMPOK KERJA PENGUJIAN
PANGAN


SUHARSO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PIL. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai ISO 17065 dan ISO 17025	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	150 Sampel

Kegiatan / Sub Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran	Keterangan
1. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 650.000.000	APBD
	Rp 650.000.000	APBD

PIL. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SUHARSO, S.P., M.Si.
Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

Ungaran, November 2024
KETUA KELOMPOK KERJA PENGUJIAN PANGAN

SUHARSO, S.P., M.Si.
Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gatot Subroto Komplek Tarubudaya Ungaran Telepon 024-6921972,6925554
Faksimile 024-6921997 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dishanpan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARSO, S.P., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, November 2024

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN

SUHARSO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19690302 133103 1 010

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN

Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.

Pembina

NIP. 19810925 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Plt. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BPMKP

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	1 Dokumen
Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah		1 Dokumen	
2.	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100%
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Paket	
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 Paket	
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 Paket	
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		12 Laporan	
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		12 Laporan	
3.	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada BPMKP	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	20 Unit
Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		20 Unit	

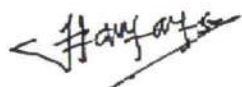
4.	Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	24 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
5.	Terpeliharanya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	12 Unit
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
A. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	40.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	40.000.000	APBD
B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	196.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	20.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	101.000.000	APBD

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	20.000.000	APBD
4. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	20.000.000	APBD
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	35.000.000	APBD
C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	441.300.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	441.300.000	APBD
D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	330.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	180.000.000	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	150.000.000	APBD
E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	356.000.000	APBD
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	306.000.000	APBD

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 50.000.000 APBD

Pit. KEPALA BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN



SUHARSO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19690302 133103 1 010

Ungaran, November 2024

Pit. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN



Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, S.P., M.Si.
Pembina
NIP. 19810925 200604 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Prosentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	5%
2	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH Provinsi	94,5
3	Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan	Rata Rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	10%
4	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	3.797 kkal/kapita/hari
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	82

Semarang, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19661016 199203 2 006